

PRESS RELEASE

Bawaslu DIY dan SIGAB Indonesia Perkuat Kapasitas Jajaran Menuju Pemilu 2029 yang Inklusif



Foto: Bawaslu DIY dan SIGAB Indonesia melakukan pelatihan pengenalan disabilitas bagi pengawas pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang inklusif

Yogyakarta — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Pengenalan Disabilitas Menuju Pemilu 2029 yang Inklusif di Kantor SIGAB Indonesia, Rabu (7/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman jajaran Bawaslu mengenai ragam disabilitas dan membangun pola interaksi yang inklusif dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

Kegiatan diikuti Ketua dan Anggota Bawaslu DIY, Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu DIY, Kepala Bagian Pengawas Pemilu dan Humas (P2H) dan Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum (P3SPH) serta staf Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu DIY, serta Direktur Eksekutif dan jajaran staf SIGAB Indonesia. Pelatihan menghadirkan tiga fasilitator dari SIGAB Indonesia, yakni Ajiwan Arief Hendradi,

Kuni Fatonah, dan M. Ismail, yang masing-masing berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai disabilitas netra, fisik, dan Tuli.

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menyampaikan bahwa Bawaslu DIY dan SIGAB memiliki irisan misi dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat mana pun. Menurutnya, setiap ragam disabilitas memiliki hambatan yang berbeda sehingga penyelenggara pemilu perlu memberikan perlakuan yang sesuai. Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan data pemilih disabilitas agar kebutuhan aksesibilitas dapat difasilitasi secara tepat.

“Bawaslu DIY dan SIGAB memiliki irisan misi yang sama: inklusivitas yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa ada yang ditinggalkan.” Ungkap Najib.

Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, Muh. Syamsudin, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dibangun bersama Bawaslu DIY. Ia menjelaskan bahwa SIGAB telah bekerja pada isu disabilitas dalam konteks pemilu sejak 2008, dengan perhatian pada aksesibilitas, partisipasi, dan kesempatan berpartisipasi secara bermakna. Menurutnya, aksesibilitas pemilu tidak lagi sebatas memastikan akses fisik ke TPS, tetapi juga memastikan penyandang disabilitas terlibat dalam keseluruhan tahapan pemilu.

Pelatihan membahas berbagai hambatan yang masih dihadapi penyandang disabilitas sebelum, saat, maupun setelah pemungutan suara. Materi antara lain mencakup persoalan pendataan pemilih disabilitas, akses informasi ke pemilu, TPS yang belum sepenuhnya aksesibel, ketersediaan alat bantu, hingga mekanisme pelaporan ketika hak pemilih disabilitas tidak terpenuhi. Peserta juga mendapatkan praktik mengenai cara berinteraksi dan memberikan pendampingan yang tepat kepada penyandang disabilitas netra, fisik, dan teman Tuli.

Salah satu pesan penting dalam pelatihan adalah menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek, bukan obyek. Bantuan tidak seharusnya diberikan secara otomatis tanpa terlebih dahulu menanyakan kebutuhan dan persetujuan yang bersangkutan. Prinsip aksesibilitas juga harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan kemandirian pemilih.

Selain materi, peserta mengikuti simulasi interaksi dengan teman Tuli dan pengenalan bahasa isyarat, serta menyaksikan video edukasi mengenai TPS aksesibel dan pendampingan pemilih disabilitas oleh petugas KPPS. Melalui simulasi tersebut, peserta memperoleh gambaran praktis mengenai pelayanan yang dapat diberikan kepada pemilih dengan ragam disabilitas sesuai kebutuhannya.

Kegiatan juga membuka ruang diskusi mengenai persoalan teknis di lapangan, termasuk pelayanan bagi pemilih dengan kondisi fisik tertentu. Dalam salah satu sesi, fasilitator

menjelaskan bahwa pelayanan perlu dilakukan secara fleksibel dan tetap menjaga martabat pemilih.

“Intinya petugas perlu fleksibel mencari cara yang tetap memastikan tanda telah mencoblos dapat diberikan tanpa mempermalukan atau menyulitkan pemilih.” Ungkap Muh. Syamsudin.

Melalui pelatihan ini, Bawaslu DIY dan SIGAB Indonesia mendorong penguatan perspektif disabilitas dalam pengawasan pemilu sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Kolaborasi diharapkan terus berlanjut sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh akses dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga dapat berpartisipasi secara bermakna dalam seluruh proses demokrasi. Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat dan plakat dari Bawaslu DIY kepada SIGAB Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang terjalin.

Foto: Heri

Editor: Tim Humas BawasluDIY